



French Interregnum: Periode Kekuasaan Perancis di Hindia Belanda (1806-1811)

Tb. Noer Iman Achmad Sumantri^{1*}

¹Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

*Email: tb.noeriman@gmail.com

ABSTRACT

This article explores the lesser-known yet historically significant presence of France in Indonesia, particularly during the late 18th and early 19th centuries. The study investigates France's attempts to establish trade relations in the archipelago through the Compagnie Française des Indes Orientales and its interactions with local powers such as the Sultanate of Banten. The research focuses on the period of French influence between 1806 and 1811, when the Netherlands became a client state of Napoleon's empire and colonial governance in the Dutch East Indies was indirectly controlled by France. Utilizing a historical-descriptive method through literature analysis, the paper analyzes the political, economic, and administrative impacts of French influence in Indonesia, including the role of Governor General Herman Willem Daendels. Although the French presence was short-lived—formally lasting only fifteen months—it left significant infrastructural and bureaucratic legacies, such as the construction of the Great Post Road and early administrative reforms. The article argues that this period, often overlooked in Indonesian historiography, constitutes a form of colonialism, albeit through indirect rule, and had more lasting effects than previously acknowledged. The study contributes to broader discussions on colonial dynamics and the global reach of French imperial ambitions.

Kata Kunci: *French Interregnum, Dutch East Indies, Napoleonic War, Herman Willem Daendels, Administrative Reforms*

PENDAHULUAN

Apabila kita bicara tentang negara-negara kolonial yang pernah berkuasa di Indonesia, atau setidaknya sebagian wilayah Indonesia, yang akan terbesit di pikiran adalah Belanda, Jepang, Inggris, Portugis, dan Spanyol. Negara-negara ini yang secara umum dikatakan pernah menjajah Indonesia. Akan tetapi, apabila kita melihat dari sejarah kolonialisme bangsa barat itu sendiri, ada satu negara yang tidak muncul dalam pembahasan ini, yaitu Prancis. Negara Prancis, sebagai negara kolonial, dari segi luas wilayah yang dikuasai merupakan yang terbesar kedua setelah Inggris. Jajahan Prancis nyaris ada di seluruh belahan dunia, mulai dari Quebec dan Louisiana di Amerika Utara sampai Mauritius

dan Mayotte di Samudra Hindia. Secara historis pun Prancis merupakan rival terbesar Inggris dalam memperebutkan supremasi dan berulang kali terlibat peperangan seperti pada perang 100 tahun, perang 7 tahun, dan Perang Napoleon.

Prancis, meski secara tidak langsung, pernah berkuasa di Indonesia. Kekuasaan Prancis disebut tidak langsung karena sebenarnya Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, lebih tepatnya Kerajaan Holland yang merupakan client state Prancis. Tetapi Kerajaan Holland ini tidak sepenuhnya berdaulat karena pemerintahannya dikontrol oleh Prancis, bahkan rajanya pun orang Prancis. Ada masa di mana secara *de jure* dan *de facto* Hindia Belanda berada langsung di bawah kekuasaan Prancis meski hanya beberapa bulan. Periode ini terjadi pada Juni 1810 sampai September 1811. Setelah invasi Inggris ke Jawa, Indonesia masuk ke periode kekuasaan Inggris.

Periode kekuasaan Inggris dan Prancis ini disebut dengan masa *interregnum*. Masa ini disebut dengan *interregnum* karena sifatnya yang merupakan peralihan antara dua periode kekuasaan Belanda di Indonesia/Hindia Belanda, yaitu periode VOC dan Hindia Belanda. Menariknya adalah, masa *interregnum* Inggris di Indonesia dikenal dengan masa Kolonialisme Inggris tetapi *interregnum* Prancis tidak dikenal dengan masa penjajahan Prancis. Periode kekuasaan Prancis ini lebih identik dengan masa pemerintahan Daendels (yang kemudian dilanjutkan oleh Janssen) dengan asumsi periode ini masih termasuk ke dalam kekuasaan Belanda. Hal ini benar adanya karena Daendels bertindak atas kuasa Kerajaan Belanda (Holland) meski berada di bawah pengaruh Prancis.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah kecenderungan untung mengesampingkan pengaruh Perancis dan faktor peristiwa di negeri Belanda. Padahal, peristiwa di negeri Belanda, dan Perang Napoleon secara keseluruhan, sangat mempengaruhi jalannya peristiwa sejarah di Indonesia selama periode tahun 1795-1815. Hal ini mengakibatkan hilangnya konteks penting dalam peralihan kekuasaan Belanda dari Kumpeni ke Hindia Belanda, yaitu perspektif dari negeri Belanda Nya sendiri. Padahal apabila pembahasannya dibahas dalam perspektif yang lebih luas, meski hanya sebagai pengantar, ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap apa yang terjadi selama periode *interregnum* ini.

METODE :

Penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya dengan melakukan kritik sumber, dan melakukan sintesis dari hasil analisis dalam bentuk tulisan. Penulisan sejarah mempunyai lima tahap, yaitu: (1) Pemilihan topik (2)

pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan (Kuntowijoyo: 90). Sumber yang digunakan pada tulisan ini adalah sumber sejarah sekunder yang berkaitan dengan periode kekuasaan Perancis di Hindia Belanda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masuknya Perancis ke Indonesia

Keberadaan Perancis di Indonesia sudah ada sejak paruh awal abad ke-16. Pelaut-pelaut Perancis sudah menjelajahi Indonesia (Hindia Timur) sejak awal abad ke-16 yang dilakukan oleh Pierre Caunay (1526-1529) dan Raoul Parmentier (1529-1530) (Dorleans: 3-10). Penjelajahan ini dilakukan oleh perorangan dan perusahaan swasta. Raja Perancis sendiri belum punya keinginan serius untuk membuka hubungan dagang atau diplomatik dengan Hindia Timur. Perancis memang berhasil memperoleh jajahan di pesisir timur Afrika (Kep. Mascarenhas) dan membuka kantor perdagangan di India dan Tiongkok. Akan tetapi, setiap tempat cenderung beroperasi secara independen dan kegiatan perdagangan Perancis di Hindia Timur kurang berkembang.

Usaha untuk membuka perdagangan dengan Hindia Timur baru muncul pada tahun 1664 ketika raja Louis XIV mendirikan Kongsi Dagang Hindia Timur Perancis atau *Compagnie Francaise des Indes Orientales* (Dorleans: 79). Kongsi dagang ini bertugas sebagai pelaksana perdagangan Perancis di Asia sekaligus untuk bersaing dengan kongsi dagang Inggris (EIC) dan Belanda (VOC). *Compagnie Francaise des Indes Orientales* kemudian membuka kantor cabang di Banten pada tahun 1671. Kongsi dagang ini berdagang secara rutin dengan Kesultanan Banten sebelum Kota Banten jatuh ke tangan VOC pada tahun 1682 (Dorleans: 89). Sekitar satu dekade kemudian kongsi dagang ini pun dibubarkan.

Setelah kejatuhan Banten, Perancis menjadi jarang beroperasi di Indonesia. Meskipun demikian pedagang Perancis masih aktif di samudra Hindia seperti di pesisir Coromandel, Madagaskar, dan Kepulauan Mascarene. Minat mereka terhadap perdagangan rempah pun tetap tinggi. Alih-alih melawan langsung Belanda di Hindia Timur, mereka memilih untuk menyelundupkan bibit tanaman rempah dan membudidayakannya di wilayah mereka sendiri di Kepulauan Karibia dan Samudra Hindia. Selama periode tahun 1749-1771 Perancis berusaha menyelundupkan tanaman pala dan cengkeh dari Maluku. Usaha ini berhasil, Pierre Poivre berhasil membudidayakan cengkeh (dan berbagai tanaman lain) di pulau Reunion (bagian dari Kep. Mascarenhas) dan secara perlahan melunturkan monopoli Belanda (Dorleans: 266-275).

Pada tahun 1789, pecah revolusi di Perancis yang berakibat pada tumbangannya kekuasaan

raja. Ide-ide revolusi mulai menyebar ke negara-negara lain di Eropa, salah satunya Belanda. Pemerintahan Belanda pada saat itu, meski berbentuk republik, didominasi oleh keluarga Oranje dan kroni-kroninya. Kelompok patriot yang anti oligarki berusaha memberontak pada 1787 tapi gerakan ini berhasil diredam oleh Pangeran Willem V. Namun, keberhasilan ini hanya berlangsung singkat. Tentara pro-revolusi, yang kali ini dibantu Prancis, kembali menyerang dan berhasil merebut kekuasaan pada Januari 1795 (Vlekke: 222). Berdirilah Republik Bataaf yang berada di bawah pengaruh Prancis.

Sejak tahun 1795 sampai 1806, Belanda bertransformasi menjadi Republik Bataaf, *sister republic* yang berada di bawah pengaruh Prancis. Willem V yang sekarang berada di pengasingan sempat mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan agar pejabat di daerah koloni menyerahkan koloni Belanda kepada Inggris pada 7 Februari 1795 (Dorleans: 220). Akan tetapi, pejabat kolonial tidak sudi melaksanakan perintah ini dan lebih memilih mengikuti pemerintahan Republik Bataaf. Hal ini membuat koloni-koloni Belanda menjadi target serangan Inggris. Tak pelak koloni-koloni Belanda terseret ke dalam arus peperangan Inggris-Prancis. Tanjung Harapan langsung direbut Inggris pada 15 Oktober 1795. Ceylon jatuh ke tangan Inggris pada Februari 1796. Demerara dan Esequibo (sekarang Guyana), koloni Belanda di Amerika Selatan, menyusul beberapa bulan kemudian. (Chartrand dan Black: 3)

Perang antara Inggris dan Prancis sempat terhenti pada 27 Maret 1802 ketika Perjanjian Amiens ditandatangani. Namun, perdamaian ini hanya berlangsung selama setahun, Inggris kembali menyatakan perang pada 22 Juni 1803. Perang kembali berkecamuk sampai ke wilayah jajahan, terutama di Karibia. Dengan cepat perang ini berkembang menjadi Perang Koalisi di mana sekutu-sekutu Inggris di Eropa daratan (Austria, Russia, Swedia, dll) ikut menyerang Prancis. Angkatan laut Prancis dihancurkan oleh Inggris di pertempuran Trafalgar pada 5 Oktober 1805. Namun hal ini diimbangi oleh kemenangan telak Prancis atas pasukan koalisi di Austerlitz pada 2 Desember 1805. Hasil ini membuat Prancis memenangi Perang Koalisi Ketiga. Namun, kekalahan di Trafalgar memberikan pukulan telak terhadap armada laut Prancis. Koloni Prancis dan Belanda pun semakin banyak yang dicaplok oleh Inggris seperti Suriname, Curacao, dan Tanjung Harapan yang kembali jatuh ke tangan Inggris.

Kondisi ini membuat Napoleon menjadi lebih hati-hati, terutama pada potensi serangan laut Inggris. Langkah yang kemudian diambil adalah mengambil alih kontrol di *sister republic* mereka, termasuk Republik Bataaf. Republik Bataaf dihapuskan dan bentuk negara Belanda diganti menjadi kerajaan pada tahun 1806. Adik Napoleon, Louis Napoleon atau yang dikenal juga dengan Lodewijk Napoleon, didaulat menjadi raja Belanda. Kerajaan

Belanda, atau yang secara resmi bernama Kerajaan Holland, kemudian menjadi negara bawahan Perancis sehingga arah kebijakan negaranya pun dibuat atas kepentingan Perancis (Planert: 53). Raja Louis Bonaparte diberikan mandat untuk mendukung kebijakan *continental system* Perancis yang bertujuan untuk memblokir perdagangan Inggris. Selain itu, dia juga diberikan tugas untuk menata ulang koloni-koloni Belanda sesuai dengan sistem pemerintahan Perancis dalam rangka mempertahankan diri dari serangan Inggris. Dampaknya adalah wilayah jajahan Belanda secara de jure berada di bawah kekuasaan Perancis atau setidaknya berada di bawah pengaruh Perancis.

3. French Interregnum, Pemerintahan Perancis di Indonesia (1806-1811).

Revolusi Perancis memberikan perubahan yang signifikan terhadap landscape sosial dan politik di Eropa. Semangat revolusi Perancis sampai ke Belanda sehingga terjadi reformasi pemerintahan di negeri tersebut. Sistem pemerintahan Belanda diganti dari bentuk konfederasi menjadi persatuan. Konstitusi baru pun disusun dengan prinsip-prinsip yang lebih demokratis. Perubahan ini pun juga diupayakan sampai ke koloni. VOC pada akhir abad ke-18 mengalami berbagai kesulitan keuangan. Kongsy dagang yang sudah lama digerogeti korupsi ini akhirnya tumbang pada tahun 1799 dan diambil alih Pemerintah Republik. Namun, perubahan ini tidak langsung terlaksana karena pemerintahan Belanda di Indonesia masih diisi oleh orang-orang yang sama.

Napoleon melihat besarnya potensi ekonomi Hindia Belanda, terutama pulau Jawa. Bagi Napoleon, pulau Jawa tidak hanya koloni yang menghasilkan laba besar, secara strategi pulau itu bisa dijadikan pijakan untuk mengusir Inggris dari Hindia sekaligus menjadi pusat perdagangan (Rocher dan Santosa: 13). Namun, kondisi Perancis di Hindia pun tidak menguntungkan. Satu-persatu wilayah Perancis dan Belanda jatuh ke tangan Inggris. Hindia Belanda merupakan satu-satunya wilayah jajahan Belanda yang masih tersisa. Oleh karena itu, pertahanan di pulau Jawa sangat penting dalam agenda Napoleon untuk memulihkan kekuasaannya di Hindia Belanda.

Ketika Louis Bonaparte diangkat menjadi raja Belanda, salah satu tugasnya adalah untuk mengatur daerah koloni. Louis Bonaparte cukup terkejut menerima banyaknya laporan buruk tentang Hindia Belanda terutama soal korupsi pegawai-pegawainya. Oleh karena itu, selain sistem pertahanan, perombakan sistem pemerintahan juga menjadi agenda penting. Selama memerintah, Louis Napoleon telah merombak administrasi pemerintahan di negeri Belanda menjadi lebih sentralistik dan terstruktur (Planert: 58). Hal yang sama coba dilakukan di Hindia Belanda, berfokus untuk mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih formal dengan tujuan memperkuat kontrol pemerintah pusat dan meningkatkan pemasukan

pemerintah yang selama ini “dimakan” oleh pejabat VOC.

Raja memutuskan untuk mengutus orang yang cakap dan berkarakter kuat, pilihan raja jatuh kepada Herman Willem Daendels. Daendels adalah seorang perwira dari golongan Patriot yang memegang teguh prinsip-prinsip Revolusi Perancis. Daendels tiba di Jawa pada 1 Januari 1808. Tugas utama yang diberikan Raja Louis kepada Daendels adalah untuk mereorganisasi pertahanan di Jawa. Daendels membongkar benteng tua Batavia dan membangun yang baru di Meester Cornelis yang letaknya agak jauh dari pantai. Daendels juga membangun benteng Lodewijk di Surabaya. Akan tetapi, pembangunan yang paling mencolok adalah pembangunan jalan raya pos/ *Groote Postweg/ Grand-route de la Poste* yang membentang sejauh 1000 km dari Anyer sampai Panarukan.

Kebijakan dan sifat Daendels yang memerintah dengan tangan besi dan tanpa kompromi menimbulkan kecaman baik dari pegawai kolonial dan bangsawan lokal. Upaya Daendels untuk merombak pemerintahan di Hindia Belanda didasari oleh ketidak sukannya dengan kaum feodal. Daendels berusaha menghapuskan feodalisme dengan mengangkat penguasa lokal sebagai pegawai pemerintah yang membuat posisi mereka ini berubah dari penguasa menjadi pegawai pemerintah. Hal ini tentu membuat mereka sakit hati. Terlebih lagi, Daendels memicu perselisihan yang tidak perlu dengan penguasa lokal seperti saat dia menyerang Sultan Banten pada tahun 1809. Laporan tentang kesewenangan Daendels pun sampai ke negeri Belanda dan Raja memutuskan untuk mengganti Daendels dengan orang yang lebih moderat.

Perang antara Prancis dan Inggris (Perang Koalisi V) kembali pecah pada April 1809. Prancis kembali menang tetapi Napoleon jengkel dengan keengganan adiknya untuk menerapkan blokade kontinental terhadap Inggris. Dampaknya adalah Inggris berhasil menginvasi Belanda. Meskipun pada akhirnya invasi ini berhasil dihalau, tetapi peristiwa ini menunjukkan titik lemah pada pertahanan Prancis. Dengan pertimbangan ini, Napoleon memutuskan untuk menganeksasi Kerajaan Belanda dan menjadikannya departemen kesembilan pada Kekaisaran Prancis pada 9 Juli 1810 (Rocher dan Santosa: 22). Berita ini tentu tidak disenangi oleh kebanyakan orang Belanda, tetapi orang-orang yang loyal dengan Napoleon, termasuk Daendels, menyambut berita ini dengan antusias. Berita resmi aneksasi tersebut baru sampai di Hindia Belanda pada 18 Januari 1811. Daendels dengan segera langsung menaikkan bendera Prancis di Batavia. Di saat yang bersamaan, Daendels dipanggil pulang dan posisinya digantikan oleh Jan Willem Janssen yang lebih moderat.

Aneksasi Prancis atas Kerajaan Belanda membuat negara Belanda dan koloni-koloninya berada di bawah kekuasaan langsung Prancis. Akan tetapi, periode

kekuasaan Prancis ini hanya berlangsung sebentar. Aneksasi Belanda dan usaha Daendels untuk mereorganisasi kekuatan militer Hindia Belanda menjadi alasan Inggris untuk menyerang (Vlekke: 238). Satu-persatu wilayah di Hindia jatuh ke tangan Inggris. Ambon jatuh pada 10 Februari 1810, diikuti oleh Manado pada 24 Juni 1810 dan Ternate pada 26 Agustus 1810 (Dorleans: 309). Posisi pulau Jawa menjadi terisolasi. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum Inggris berhasil menguasai Jawa.

Gubernur Jendral India, Lord Minto, memimpin armada dengan kekuatan seratus kapal dan 12.000 serdadu untuk menyerang Jawa (Vlekke: 242). Janssen menghadapi situasi tanpa harapan ketika ia sampai di Jawa. Keangkuhan Daendels menimbulkan kebencian di kalangan penguasa Jawa. Pasukan yang tersebar pun tidak membantu. Terlebih lagi, kemampuan taktis komandan pasukan Prancis yang ditugasi di bawah Janssen sangat buruk. Pasukan Inggris mendarat di Batavia pada 4 Agustus 1811 dan dengan mudah merebut kota tersebut. Pada 18 September 1811, Janssen akhirnya menyerah dan Hindia Belanda pun jatuh ke tangan Inggris. Lord Minto kemudian menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Jendral di Jawa yang sekaligus membawahi wilayah-wilayah lain di Hindia Timur. Berakhirlah kekuasaan Prancis yang hanya berumur 15 bulan di Indonesia.

4. Analisis terhadap kekuasaan Prancis

Kekuasaan Prancis di Indonesia hanya berlangsung singkat. Secara de jure, kekuasaan Prancis dimulai saat Belanda dianeksasi pada 9 Juli 1810 sampai penandatanganan Kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Akan tetapi pengaruh Prancis sendiri sudah ada sejak tahun 1795 dan makin jelas saat “Kerajaan Belanda” yang pada kenyataannya dipegang oleh orang Prancis dibentuk pada 1806. Inilah alasan mengapa pada buku Dorleans, Roche, dan Vlekke angka tahun 1806-1811 disebut sebagai “periode Prancis” di Indonesia. Tulisan “periode Prancis” di sini dalam tanda kutip karena kekuasaan itu bersifat tidak langsung dan baru secara formal dimulai pada 1810.

Meskipun kekuasaan Prancis bersifat tidak langsung, warisan dari kekuasaan mereka cukup besar. Daendels telah meletakkan fondasi pembangunan infrastruktur Jawa lewat jalan raya pos. Reformasi birokrasinya menjadi pondasi bagi pembaharuan yang dilakukan oleh Raffles. Daendels bisa dibilang orang Belanda yang punya otak Prancis, tindakannya pun berdasarkan perintah Napoleon. Warisan Prancis itu ada meskipun, mungkin, lebih cocok disebut Franco-Belanda. Satu hal yang pasti, pengaruh Prancis bagi Indonesia lebih jelas dibanding pengaruh Spanyol, negara kolonial yang selama ini dianggap ada di Indonesia. Periode waktu 15 bulan kekuasaan Prancis pun lebih cocok disebut “kolonialisme” dibanding 5 tahun kekuasaan Inggris yang lebih tepat disebut sebagai pendudukan.

KESIMPULAN DAN SARAN:

Kekuasaan Prancis di Indonesia, meskipun berlangsung dalam waktu yang relatif singkat secara *de jure*—yaitu antara tahun 1810 hingga 1811—memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan tata kelola kolonial di Hindia Belanda. Melalui figur Herman Willem Daendels yang diangkat oleh Raja Louis Bonaparte, Perancis berhasil menerapkan sejumlah reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur yang menjadi pondasi penting bagi pemerintahan kolonial berikutnya. Jalan Raya Pos (*Groote Postweg*) dan restrukturisasi administrasi pemerintahan merupakan warisan nyata dari periode ini. Meskipun kekuasaan Prancis bersifat tidak langsung dan seringkali dikaburkan di bawah nama pemerintahan Belanda, pengaruh Prancis tetap nyata baik secara politik maupun ekonomi. Selain itu, analisis historis menunjukkan bahwa dibandingkan Spanyol—yang juga dianggap pernah hadir di Indonesia—kehadiran Prancis jauh lebih konkret dan berdampak. Oleh karena itu, periode kekuasaan Prancis di Indonesia patut dikaji lebih dalam sebagai bagian dari sejarah kolonialisme, bukan sekadar sebagai pengaruh asing temporer. Penelitian ini menegaskan pentingnya memperluas perspektif dalam menelaah dinamika kolonial di Indonesia dengan mempertimbangkan aktor-aktor non-dominan yang sering terlupakan dalam narasi sejarah utama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bernard Dorleans. (2016). *Orang Indonesia dan Orang Prancis: Dari Abad XVI sampai Abad XX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Bernard Vlekke. (2017). *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Jean Rocher dan Iwan Santosa. (2013). *Sejarah Kecil Indonesia Perancis 1800-200 (Petite Histoire de L'Indonésie et du Français)*. Jakarta: Kompas.
- M. C. Ricklef. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: UGM Press.
- Tim Majalah Historia. (2018). *Daendels: Napoleon Kecil di Tanah Jawa*. Jakarta: Kompas.
- Peter Carey. (2008). *The Power of Prophecy: Prince Dipanegara and the end of an Old Order in Java, 1785-1855*. Leiden: KITLV Press.
- Rene Chartrand. (1989). *Napoleon's Overseas Army*. London: Osprey Publishing
- Ute Planert. (2016). *Napoleon's Empire: European Politics in Global Perspective*. New York: Palgrave Macmillan

Artikel Jurnal

- Gottman, Felicia (2013). French-Asian Connection: The Compagnies des Indes, France's Eastern Trade, and New Directions in Historical Scholarship. *The Historical Journal*, 56 (2). DOI: 10.1017/S0018246X13000022.

- Jaelani, Gani Ahmad (2022). Penjelajahan Orang Prancis dan Penelitian Sejarah Alam di Nusantara Akhir Abad XVIII dan Awal Abad XIX. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 7 (1), 13-25. <https://doi.org/10.14710/jscl.v7i1.35574>
- Raharjo, Yoel Kurniawan (2024). Kebijakan Pemerintah Daendels di Jawa 1808-1811. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10 (1), 8-15. <https://dx.doi.org/10.30870/candrasangkala.v10i1.22563>
- Sinaga, Rosmaida. Pratama, Dian. Piliang, Putri Hasanah. Ningrum, Dewy Maulidya. (2024). Kemanusiaan dan Eksploitasi: Analisis Kebijakan Daendels di Tanah Jawa (1808-1811). *Ar-Rumman-Journal of Education and Learning Evaluation*, 1 (2).